

9. KULTURALISME DAN MULTIKULTURALISME

Oleh

Putu Rumawan Salain

I Wayan Winaja

Relin D.E

Dewa Made Darmawan

Perkembangan kehidupan dan penghidupan manusia di belahan bumi ini mengalami dinamika dengan berbagai pasang-surut, suka-duka, terpecah-belah, bersatu-padu dan sebagainya. Berbagai kejadian tersebut bersumber pada ulah dan perbuatan manusia sendiri baik perorangan, kelompok, maupun bangsa, hingga negara, karena dipicu oleh faktor ekonomi, ideologi, dan lainnya. Runtuhnya komunisme pada era 1980-an dan 1990-an di Eropa Timur berdampak pada perpecahan maupun penyatuan negara dan atau bangsa. Sebut saja Negara Uni Soviet yang kini tercerai-berai. Kemudian, sebagai contoh yang sangat menarik adalah bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur sebagai sebuah negara yang tunggal.

Kejadian-kejadian lainnya yang tidak kalah menariknya adalah krisis dan pertikaian panjang di Timur Tengah seperti antara Palestina dengan Israel yang akhirnya menarik negara-negara besar dengan berbagai peran dan kepentingan. Contoh konflik berkepanjangan lainnya di Asia adalah Cina dengan Taiwan, Korea Utara dengan Korea Selatan, dan lain-lainnya. Bahkan di sebuah negara seperti Indonesia yang kerap mengagung-agungkan narasi Bhineka Tunggal Ika, mengalami pula dinamika dan pasang-surutnya. Pada tahun 1996 yang lalu bangsa dan negara ini tercoreng pula wajahnya akibat kasus-kasus kekerasan dan konflik yang bernuansa etnis ataupun atas nama agama. Peristiwa yang berlangsung di Jakarta, Sambas, Ambon, dan lainnya, terekam sebagai noda-noda hitam dalam lembaran sejarah bangsa ini.

Dalam konteks kajian budaya, contoh-contoh tersebut di atas merupakan gambaran pertarungan kekuatan ideologi "politik", agama, etnik, dan sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut menjadi representasi dari hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, keberpihakan, keterpinggiran, bahkan juga dengan dominasi dan keunggulan. Sejarah pun menulis tentang keunggulan bangsa Roma 'Itali', ras Arya, Arab, Yunani, Yahudi, Cina, India, Jepang, dan lainnya sehingga mampu melahirkan pemikir-pemikir besar, agama besar, teknologi canggih, ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya.

Perkembangan peradaban manusia rupa-rupanya juga tidak atau belum mampu menjamin penyelesaian tuntas berbagai persoalan manusia yang karena kodratnya baik lahir dengan perbedaan warna kulit, ideologi, kultur, maupun perbedaan kepercayaannya. Kini, dengan tertanggalnya batas-batas negara dan bangsa yang dibingkai oleh Globalisasi, dalam kehidupan dan penghidupannya manusia akan semakin tidak peduli akan ruang dan waktu. Sikap kosmopolitan berkembang luas. Ruang dan waktu menjadi maya dan dipertemukan melalui komunikasi. Ketertarikan, keingintahuan, bahkan juga kebencian menjadi satu sehingga percampuran, pemurnian, ataupun gejala lainnya menjadikan suku, bangsa, bahkan kultur bercampur, menguat, ataupun memisah, melemah, dan sebagainya hingga kemudian terbentuk multikultur.

Permasalahan yang kemudian berkembang, juga yang dihadapi oleh setiap bangsa termasuk Indonesia adalah: apakah kulturalisme dan multikulturalisme, serta bagaimanakah keberlangsungan kulturalisme dan multikulturalisme di Indonesia? Kedua permasalahan tersebut dicoba dibahas melalui telaah pustaka dan refleksi ringan atas realitas bangsa kendati pemahamannya dilakukan dengan kemampuan yang terbatas.

Kulturalisme

Kulturalisme dan Multikulturalisme terdiri atas dua istilah. Kedua-duanya berasal dari kata kultur, *culture*, kultural dengan imbuhan multi-. Kultura atau kebudayaan oleh Williams (lihat Barker, 2006:39) diuraikan dengan singkat sebagai "keseluruhan cara hidup". Secara rinci pendapat Williams tentang kebudayaan dituliskan sebagai berikut:

Kebudayaan itu seni sekaligus nilai, norma, dan benda simbolis kehidupan sehari-hari. Sementara kebudayaan itu sendiri selain terkait dengan tradisi dan reproduksi sosial ia juga merupakan soal kreativitas dan perubahan.

Dengan demikian kebudayaan adalah dinamika kehidupan yang berlangsung dalam ruang dan perjalanan waktu. Kita hidup dengan cara-cara tertentu di sekitar lingkungan hidup kita, dan kendati berpola, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita hasilkan, tidaklah sama. Hari ini berbeda dari hari kemarin, dan hari esok akan berbeda pula proses dan alur hidup manusia. Dengan demikian bentuk hidup dan makna hidup kita pun berkembang terus-menerus.

Menurut Barker (2005:20), **kulturalisme** memberi penekanan pada sifat yang "biasa-biasa saja" dari kebudayaan dan kapasitas aktif dan kreatif manusia dalam membentuk praktik-praktik bersama yang sarat makna. Kajian-kajian empiris, yang dinilai penting dalam tradisi kulturalis, mengeksplorasi cara khas etnisitas manusia secara aktif menciptakan makna kultural. Dalam kaitan ini, yang menjadi pusat perhatian kulturalisme yakni ada pada pengalaman hidup keseharian dan mengadopsi definisi kebudayaan yang lebih antropologis, dan menggambarkan kebudayaan sebagai kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas hanya pada seni "tinggi".

Kulturalisme menekankan 'kelaziman' kebudayaan dan aspek aktif, kreatif, dan kapasitas orang untuk mengonstruksi praktik-praktik bermakna secara bersama-sama

(Barker, 2008:16). Pada sumber yang sama disebutkan pula oleh Williams dan Thompson secara khusus bahwa, kulturalisme adalah bentuk dari materialisme kultural historis yang melacak perkembangan makna di sepanjang waktu, mengeksplorasi kebudayaan dalam konteks kondisi material produksi dan penerimaannya.

Bagi Williams dan Thompson, **kulturalisme** merupakan sebetulnya materialisme kultural historis yang melacak perkembangan makna dari masa ke masa, menyelidiki kebudayaan dalam konteks kondisi material yang melingkupi proses produksi dan resepsi kebudayaan. Kulturalisme menempatkan makna sebagai kategori dasarnya dan menganggapnya sebagai produk agen manusia yang aktif, misalnya industri budaya kecantikan. Menurut Hall seperti dikutip Barker (2005:51) dalam narasi retrospektif kajian budaya, Richard Hoggart, Edward Thompson dan Raymond Williams, adalah orang-orang yang mendorong lahirnya pemahaman tentang budaya dan konteks modern yang antropologis dan historis. Pandangan mereka disebut "kulturalisme". Meski ada beberapa perbedaan penting antara tiga tokoh tersebut di atas, akan tetapi ketiganya sama-sama terfokus pada karakteristik biasa-biasa saja dari kebudayaan dan pada kapasitas aktif dan kreatif orang kebanyakan untuk mengonstruksi praktik-praktik bersama yang bermakna. Ketiganya juga menaruh perhatian khusus pada persoalan budaya, kelas, demokrasi, dan sosialisme dalam konteks sejarah kelas pekerja Inggris.

Kulturalisme yang dipraktikkan Williams (juga Hoggart dan Thompson) yang biasa disebut kulturalisme kiri, merupakan sebetulnya materialisme historis-kultural yang mengeksplorasi kebudayaan dalam konteks kondisi-kondisi material ketika ia diproduksi dan dikonsumsi (Antariksa, 2007). Selanjutnya Antariksa menuliskan bahwa, kulturalisme menekankan sejarah serta memfokuskan diri pada interpretasi sebagai jalan untuk memahami makna.

Sejarah *Cultural Studies* memiliki tokoh utama yang mewakili kulturalisme antara lain: Richard Hoggart, Raymond Williams, dan Edward Thomson. Pada perjalanan

waktu berikutnya kulturalisme menempatkan logikanya berseberangan dengan strukturalisme. Bila kulturalisme memandang makna sebagai kategori utama dan melihatnya sebagai produk agen manusia aktif, maka strukturalisme justru berbicara tentang praktek signifikasi yang membangun makna sebagai hasil struktur atau regularitas yang dapat diperkirakan dan berada di luar diri individu (Barker, 2008:16-17).

Selanjutnya pada sumber yang sama dituliskan bahwa kulturalisme memfokuskan perhatiannya pada produksi tanda oleh aktor manusia dalam suatu konteks historis, sedangkan strukturalisme memandang kebudayaan sebagai struktur dalam bahasa yang ada di luar kehendak aktor dan menguasai mereka. Bila sejarah menjadi penekanan kulturalisme, maka strukturalisme melakukan pendekatannya yang bersifat sinkronis, menganalisis struktur relasi dalam suatu saat tertentu. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat di atas, fokus kulturalisme ada pada interpretasi sebagai cara memahami makna, sedangkan strukturalisme terletak pada ilmu tanda sebagai upaya pendekatan obyektif.

Multikulturalisme

Rob Reich (lihat Harahap, 2007) membedakan multikulturalisme deskriptif dengan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (pluralistik). Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara/bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Tampaknya untuk kasus Indonesia misalnya, multikulturalisme normatif lebih berkembang dibandingkan dengan multikulturalisme deskriptif. Dari sumber yang sama H. M. Atho' Muzhar berpendapat bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara yang majemuk secara etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

Multikulturalisme (lihat Mas'udi, 2007) adalah suatu istilah yang berkembang di Eropa kemudian menyebar ke tempat lainnya. Secara konseptual, multikulturalisme lebih mengacu kepada kebijakan yang menghargai hak setiap warga negara yang plural. Plural di sini tidak hanya pada wilayah agama tetapi pada berbagai macam identitas, etnis, suku, ras, tradisi, dan lain-lain. Esensi terminologi pluralisme dan multikulturalisme (lihat Putra, 2008:17) adalah bahwa keduanya sama-sama mengakui kejamakan, namun perbedaannya terletak pada wilayah kejamakan. Multikulturalisme mengandaikan kejamakan antaretnik atau bangsa dalam satu entitas, sedangkan pluralisme mengandaikan kejamakan dalam satu etnik/bangsa dalam satu entitas.

Hardjana menyatakan bahwa **multikulturalisme** adalah gerakan akademis untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghargai dalam satu tatanan masyarakat berbangsa/bernegara. Dalam hubungannya dengan kebudayaan, multikulturalisme dapat diartikan sebagai berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan masyarakat. Tiga syarat multikulturalisme yang ditulis Brian Fay, dalam bukunya *Contemporary of Social Science A Multicultural Approach* adalah adanya: Interaksi antarkelompok, Keterbukaan, dan Pembelajaran. Dalam multikulturalisme, pasti ada interaksi dan komunikasi, ada suasana saling menerima dengan hati, dan karenanya, menjadi pembelajaran hidup yang berkelanjutan antargenerasi pula jika kebersamaan tetap menjadi harapan, andalan, dan kenyataan sosial-kultural.

Sedangkan menurut Agger (2005:140), **multikulturalisme** adalah varian teori perbedaan yang mengambil ide dari gagasan posmodernisme bahwa perbedaan manusia secara analitis lebih penting ketimbang kesamaan mereka. Dalam konteks ini Agger mengemukakan lebih jauh, bahwa multikulturalisme merayakan perbedaan sebagai satu kerangka kerja yang ada di dalamnya, untuk menghargai banyak

kelompok dan narasi khas mereka tentang pengalaman mereka. Senada dengan konsep yang dikemukakan Agger, menurut Barker (2005:480), strategi multikulturalis juga menginginkan citra-citra positif, tetapi tidak mengusahakan terwujudnya asimilasi. Strategi ini menganggap semua kelompok etnis memiliki status yang setara, dengan hak untuk melestarikan warisan budayanya masing-masing. Multikulturalisme hendak merayakan perbedaan. Menurut Suparlan (2005), multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kelompok kebudayaan. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian tanpa ada konflik dan kekerasan. Ini berarti pula, multikulturalisme menekankan persamaan hak, kewajiban, dan harga diri baik pada tataran individu maupun pada tataran kelompok.

Sedangkan **multikulturalisme**, menurut Juliawan dalam artikel yang berjudul "Kerangka Multikulturalisme" (*Kompas*, 28 September 2004), adalah kata sifat yang menunjukkan fakta keberagaman. Juga, multikulturalisme menunjuk sikap normatif atas fakta keberagaman itu. Keberagaman di Indonesia sering digambarkan amat lebar dengan sekitar dua puluh lima rumpun bahasa, lebih dari dua ratus lima puluh rumpun dialek, sekitar empat ratus kelompok etnis dan suku bangsa, dan lima agama resmi, serta berbagai bentuk kepercayaan. Sedangkan menurut Yaqin (2005:3), Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari puluhan ribu pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 220 juta jiwa, terdiri atas ratusan sukubangsa yang menggunakan ratusan bahasa lokal yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.

Secara umum multikulturalisme dikelompokkan dalam lima bentuk yaitu: *isolationist*, *accomodative*, *auto nomist*, *critical or interactive*, dan *cosmopolitan mult ikulturalism*. (Parekh, dalam Sunarto, dkk, 2004 :2). Secara rinci ke lima bentuk multikulturalisme tersebut diuraikan sebagai berikut (Azra, 2003:41-42).

1. Multikulturalisme Isolasionis: masyarakat dari berbagai kelompok kultural yang menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain yang sangat minimal. Hakikatnya adalah menerima keberagaman dan pada saat yang sama mempertahankan budaya mereka secara terpisah. Contohnya kelompok masyarakat pada sistem millet di Turki Usmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat.
2. Multikulturalisme Akomodatif: masyarakat plural yang memiliki kultural dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Kristalisasinya berada pada terakomodasinya kepentingan masyarakat kultural minoritas maupun kultural dominan. Contohnya ada di Inggris, Perancis, dan negara Eropa lainnya.
3. Multikultural Otonomis: masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Kata kuncinya berada pada kesetaraan. Contohnya ada di Kanada dengan kelompok Quebecois, dan kelompok Muslim imigran di Eropa yang menuntut penerapan syariah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.
4. Multikulturalisme Kritis atau Interaktif: masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kata kuncinya ada pada

kultural kolektif baru yang egaliter dan orisinal, "*genuine.*" Contohnya, perjuangan masyarakat Hitam di Amerika Serikat, di Inggris, dan lainnya.

5. Multikulturalisme Kosmopolitan: penghapusan batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat. Dalam konteks kosmopolitan ini, setiap individu tidak lagi terikat dan komit pada budaya tertentu, dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Pendukungnya adalah sebagian besar kaum intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis. Mereka memandang seluruh budaya sebagai sumber yang dapat dipilih dan diambil secara bebas.

Dari pandangan nilai, *multikulturalism* dinyatakan oleh Blum (dalam May dkk., 2001:16) sebagai berikut:

"sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri".

Memperhatikan uraian di atas tampak bahwa kulturalisme di Indonesia memfokuskan perhatiannya pada produksi tanda oleh aktor manusia dalam suatu konteks historis, dan interpretasi sebagai cara memahami makna. Manusia sebagai aktor dalam pelbagai perannya seperti di bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lainnya, melahirkan berbagai tanda sesuai dengan ruang dan waktu kesejarahannya guna memengaruhi, menguasai, sekaligus menjadi alat pembenar.

Memahami makna melalui pendekatan interpretasi akan masuk pada ranah yang bebas, luas, dan dalam serta jauh dari objektivitas. Beragamnya suku, ras, agama, masyarakat di Indonesia untuk menerima satu kesatuan makna secara interpretatif tampaknya akan mustahil. Sebutlah Undang-Undang Pornografi yang ditetapkan

oleh legislatif masih mendapat tentangan atau penolakan oleh masyarakat, karena spasial atau ruang tafsir di antara masyarakat yang dicitrakan oleh para aktor dibelakangnya terputus oleh sejarah.

Multikulturalisme di Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengagungkan Bhineka Tunggal Ika menjadi bukti pengakuan terhadap masyarakatnya yang plural. Dari sisi kesejarahannya masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke terdiri atas bangun suku, ras, dan agama yang berbeda. Bahkan di beberapa kota besar terkonsentrasi tidak lagi hanya oleh komunitas Indonesia belaka, akan tetapi juga Cina, Arab, Jepang, dan asing lainnya. Heterogenitas yang memang plural tersebut menjadi lebih rumit, unik, apalagi ketika di antara mereka telah banyak yang menikah dan membuahkan keturunan baru. Masing-masing di antara mereka tumbuh dan besar di antara modal budaya yang beragam pula.

Ditinjau dari bentuk multikultural yang didefinisikan oleh Parekh dengan penjelasan Azra yaitu bahwa Multikultural Isolasionis, Akomodatif, Otonomis, Kritis atau Interaktif, dan Kosmopolitan, dapat digunakan dalam realitas Indonesia. Dapat dirampatkan bahwa di negeri ini, pada dasarnya kelima kategori itu berlangsung dengan derajat dan dinamikanya masing-masing. Secara nasional tampak bahwa multikultural otonomis sedang berlangsung, dipelopori oleh masyarakat muslim seperti tumbuhnya upaya-upaya penerapan syariah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, demikian pula terhadap upaya membangun rumah sakit yang bernuansa muslim, termasuk ekonomi syariah. Kesetaraan kelompok kultural utama dengan budaya dominan "nasional" selanjutnya diikuti pula oleh kelompok-kelompok kultural minoritas seperti Hindu, Kristen, Katholik, dan bahkan etnis Cina. Ini adalah fenomena multikultural yang menarik untuk dikaji.

Kekuatan tradisi dan sistem sosio-kultural yang sangat melekat pada masyarakat Indonesia adalah modal dasar dari pengakuan terhadap pluralisme. Kegagalan pemerintah Indonesia pada tahun 1996 untuk meredam konflik dan kekerasan yang

bernuansa etnis adalah karena tradisi dan sistem sosial kultural sebagai kearifan lokal oleh Orde Baru, dengan alasan pembangunan, tidak mendapat ruang hidup yang layak. Dampak negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya memang multikultural adalah disintegrasi sosial kultural dan politik.

Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang terkait dengan tugas mengawal agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kesadaran kritis perlu dikembangkan melalui pendidikan multikultural, seperti yang diwacanakan berbagai kalangan. Jika upaya tersebut tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan muncul berbagai gerakan separatis yang mengancam stabilitas dan keutuhan bangsa dan negara. Gerakan pemisahan diri itu terjadi karena masyarakat Indonesia yang multikultur secara demografis dan sosiologis, selain potensial bagi terjadinya konflik, juga karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural.

Menurut Ting-Toomey dalam Rahardjo (2005:1), identitas kultural merupakan kebermaknaan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok kemudian melakukan identifikasi kultural, adalah ciri-ciri masyarakat yang masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Dalam kaitan ini, identifikasi kultural (Rogers dan Thomas, 1999:97) justru akan menentukan individu-individu termasuk dalam *in-group* tertentu dan individu-individu yang berada dalam *out-group*. Jadi jelas, ada kelompok "kami" dan "mereka". Bagaimana mereka berperilaku, sebagian ditentukan oleh kebudayaan mereka, apakah mereka termasuk ke dalam budaya tertentu atau tidak.

Menurut Du Bois dan Miley (1992) bahwa yang terpenting dalam masyarakat multikultural adalah memiliki dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling menghormati antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan atau cara hidup

berbeda, adanya penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.

Kleden (2004) dengan cermat menyatakan sebagai berikut: prinsip multikultural adalah bahwa kita bisa setiap saat melakukan *linking* dan *delinking* di dalam kebudayaan. "Saya menghubungkan diri dengan sistem nilai, tetapi saya juga berusaha melepaskan diri dari jebakan sistem nilai saya supaya saya bisa mengerti sistem nilai yang lain sementara waktu dengan benar". Permasalahannya justru proses *linking* dan *delinking* berada pada persoalan ruang dan waktu atau yang menurut konsep Bali dikenal sebagai *Desa* (tempat), *Kala* (waktu), dan *Patra* (kondisi). Ruang dan waktu seolah-olah tiada batas dan sekat. Kulturalisme dan multikulturalisme berlangsung menembusi batas-batas ruang dan waktu di mana saja manusia tinggal dan hidup bersama orang lain secara dinamis.

Pendekatan kulturalisme dan multikulturalisme di Tanah Air sangat relevan guna membangun dialog dengan semua elemen masyarakat agama, sosial, politik, dan lain-lain agar praktek monokulturalisme yang pernah berlangsung ketika Orde Baru tidak terulang dan Narasi Agung Bhineka Tunggal Ika dapat merajut kembali nilai dan makna modal kultural lokal dan nasional serta tidak canggung dan enggan dalam pergaulan kultur dunia. Kata kunci yang menjadi jaminan keberhasilan multikulturalisme adalah "selalu berhasil menggalang interaksi, keterbukaan, kejujuran, ketulusan, dan pembelajaran". Tiada dusta di antara kita, tiada dusta antara kami dan mereka. Keberhasilan multikulturalisme bermuara pada semakin dinamisnya atau semakin berprosesnya hubungan resiprokal antarkultur yang memperkokoh kulturalisme.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat khususnya di Bali, memang ada relevansinya. Ternyata, sejak dahulu di Bali telah diimplementasikannya nilai-nilai dan semangat yang terkandung dalam

konsep multikulturalisme. Hal itu bisa dilihat dengan adanya konsep *menyama braya*. Orang Bali khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu mengenal istilah *nyama selam* dan *nyama kristen*. Etnis Tionghoa diberikan julukan sebagai *nyame kelihan*. Karena adanya konsep *menyama braya* sebagai aktualisasi ajaran *Tri Hita Karana* niscaya kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat yang bersifat plural bisa diwujudkan. Inilah Narasi Agung yang sesungguhnya, yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam segala lini kehidupan. Sejauh mana realitas multikultural dalam kehidupan kontemporer, menjadi fokus bidikan akademis yang sangat menggelitik anak bangsa untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi.

Tugas lanjutan :

- a. Renungkan dan diskusikan ikhwal pentingnya konsep kulturalisme!
- b. Diskusikan secara mendalam dan kritis dalam kelompok, ikhwal fenomena multikulturalisme di Indonesia di tengah arus dan tantangan budaya global!